



Bidik Proyek Biogas di Nusa Penida

Kejari Kantongi Nama Tersangka

Semarang (Bali Post) -

Langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung untuk menggeber dugaan kasus korupsi tak hanya pada penggunaan APBDes Satra, Kecamatan Klungkung dan penerapan tarif kapal ro-ro Nusa Jaya Abadi. Yang terbaru dibidik yakni dugaan korupsi proyek biogas di Nusa Penida. Disebut-sebut kasus ini tinggal menetapkan tersangka yang melibatkan sejumlah oknum pejabat di lingkungan Pemkab Klungkung. Bahkan juga berpotensi merembet ke oknum dewan.

Kajari Klungkung Syiful Alam melalui Kasi Pidus Meyer Volmar Simanjuntak, Minggu (22/4) kemarin, mengungkapkan penyelidikan dugaan kasus ini bukan baru berlangsung. Namun sudah sejak 2016. Proyek tersebut tersebar di Desa Kutampi Kaler, Sakti dan Klumpu dengan total nilai Rp 890 juta. Sesuai hasil pengecekan dari 40 titik, yang dikerjakan hanya 38 titik dan seluruhnya mangkrak. Sementara sisanya lagi dua titik laporannya dibuat fiktif. "Kami sudah periksa sekitar 70 saksi. Ada dari penerima, pejabat, maupun pemborong," sebutnya.

Untuk itu, pihaknya mengaku telah mengantongi nama tersangka yang merupakan oknum pejabat. Hanya untuk namanya belum bisa disampaikan dengan alasan masih menunggu hasil penghitungan kerugian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), apakah secara total cost atau

real cost. Ini dijanjikan keluar akhir April ini. Pria bermata sipit ini menyebutkan proyek yang berjalan tahun 2014 itu dikelola Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan KB yang kini menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB.

Status tersangka juga berpotensi menjerat oknum anggota Dewan Klungkung yang kala itu disebut-sebut sebagai pelaksana proyek.

"Sesuai hasil penyelidikan, proyek itu tidak sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Bahkan beberapa kriteria dalam petunjuk itu diabaikan alias dihilangkan. Yang jelas kami menemukan adanya perbuatan melawan hukum. Untuk pengumuman tersangka, tunggulah sampai Mei," katanya.

Disampaikan lebih lanjut, anggaran proyek yang diperuntukan warga miskin itu bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan pendampingan dari pemkab sebesar 10 persen.

Munculnya bau amis proyek ini berawal dari hasil pemeriksaan BPK. (kmb45)



Meyer Volmar Simanjuntak

Bali Post/sos

Edisi : Senin, 23 April 2018

Hal : 12